

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan analisis SPSS terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi, maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah belum bersifat inklusif dan belum mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dominasi sektor-sektor padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja miskin serta ketimpangan distribusi hasil pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru dapat memperlebar kesenjangan dan tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan.

- 2 Upah Minimum tidak mampu secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat

disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor informal yang tidak terikat oleh kebijakan upah minimum. Selain itu, variabel-variabel lain seperti inflasi, tingkat harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap pekerjaan produktif mungkin lebih berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan upah minimum saja tidak cukup untuk menekan angka kemiskinan, terutama jika tidak dibarengi dengan upaya penguatan sektor informal dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3 Tingkat Pengangguran mampu meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar pula kemungkinan individu atau rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya sumber pendapatan dan daya beli, yang sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini juga diperburuk apabila pengangguran terjadi dalam skala luas dan berkepanjangan, serta tidak diimbangi dengan pelatihan keterampilan atau penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penurunan angka pengangguran menjadi salah satu faktor kunci dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

5.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan sinergi antarsektor dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor

produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan UMKM dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran berbasis digital. Selain itu, peningkatan infrastruktur penunjang seperti jalan, transportasi, dan konektivitas antarwilayah juga perlu menjadi prioritas, guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah disarankan untuk menetapkan kebijakan upah minimum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak (KHL), tetapi juga memperhatikan produktivitas tenaga kerja dan kondisi ekonomi makro daerah. Dengan demikian, upah minimum yang ditetapkan dapat menciptakan keseimbangan antara daya saing usaha dan perlindungan terhadap pekerja. Penyesuaian upah yang tepat diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara simultan.
3. Diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja (vocational training) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya di sektor-sektor strategis. Selain itu, kolaborasi dengan dunia industri dan pendidikan tinggi perlu diperkuat untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, khususnya di kalangan usia produktif, serta menciptakan tenaga kerja yang

adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar tenaga kerja.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti investasi daerah, kualitas pendidikan, ketimpangan pendapatan, atau indeks pembangunan manusia (IPM) untuk melihat pengaruh yang lebih komprehensif terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, analisis dengan pendekatan panel data antar-kabupaten/kota di Jawa Tengah juga dapat memberikan gambaran yang lebih dalam terkait dinamika ekonomi dan sosial di tingkat lokal.